

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki era kontemporer, satu ranah teknologi yang semakin banyak mendapat perhatian secara luas adalah teknologi 5G. Perlu dimengerti secara singkat bahwa 5G adalah teknologi seluler nirkabel generasi selanjutnya, menyediakan kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat. Tidak hanya berlaku untuk perangkat telepon genggam, berbagai teknologi lain seperti sensor, termostat, mobil, robot, dan sebagainya akan diyakini terhubung dengan jaringan 5G. Seterusnya kemudian jaringan 5G dapat menghadirkan kapabilitas komputasi dan penyimpanan via nirkabel untuk menghemat banyak daya dan ruang dalam perangkat penggunaanya (Goldman, 2019). Fitur-fitur tersebut kemudian akan mempercepat kemajuan robotika dan otomatisasi, *virtual* dan *augmented reality*, serta kecerdasan buatan dan *machine learning*, alhasil mengubah pola penggunaan perangkat dan aplikasi pintar serta seluruh operasi masyarakat digital. Maka tampak indikasi kehadiran 5G sebagai inovasi yang tak terpisahkan dari sistem digital dan masyarakat kontemporer (Kaska, et.al., 2019).

Semakin banyak negara yang mengadopsi teknologi 5G, namun salah satu diantaranya yang menaruh banyak perhatian pada pengadopsian teknologi 5G secara masif adalah Republik Korea atau Korea Selatan. Terutama di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan berupaya menjadi pengadopsi teknologi 5G “pertama di dunia” dan “pertama dengan kualitas global” (Gillispie, 2020). Demi target tersebut maka pada tanggal 3 April 2019, Korea Selatan menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan jaringan 5G yang menyeluruh secara nasional. Jaringan 5G ini diluncurkan secara bersamaan oleh tiga perusahaan telekomunikasi besar nasional, yakni SK Telecom, KT Corporation, dan LG Uplus (U+) di bawah koordinasi dengan Kementerian Sains dan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) (Gillispie, 2020). Masing-masing perusahaan kemudian diberikan kebebasan untuk menentukan dan memilih *supplier* atau penyedia infrastruktur 5G sesuai kebutuhan. Maka untuk alasan tersebut, tersedia sejumlah pilihan penyedia 5G yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan telekomunikasi diatas untuk mendukung instalasi

jaringan 5G dalam negara, diantaranya adalah Ericsson dari Swedia, Nokia dari Finlandia, dan Huawei dari Tiongkok.

Dari ketiga pilihan tersebut, Huawei Technologies Co Ltd adalah pilihan yang patut dipertimbangkan, perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia infrastruktur dan perangkat pintar teknologi informasi dan komunikasi yang bermarkas di Shenzhen, Tiongkok. Khusus dalam lingkup teknologi 5G, Huawei bisa dianggap sebagai pemegang peran penting dalam pengembangannya, bahkan disebutkan bahwa Huawei adalah perusahaan pertama di seluruh dunia yang meluncurkan chip inti komersial yang dirancang khusus untuk stasiun pangkalan 5G (Huawei, 2019a), dan bersama itu pula, Huawei terus menawarkan solusi komersial pelengkap lainnya untuk mendukung industri 5G. Infrastruktur 5G yang ditawarkan oleh Huawei pun juga menarik dari sisi harga karena setidaknya lebih murah 30% dari para pesaingnya. Menurut para kritikus, hal ini berkaitan dengan subsidi besar yang diberikan negara Tiongkok untuk perusahaan lokalnya, situasi ini alhasil menciptakan ketergantungan dunia pada peralatan Tiongkok untuk infrastruktur kritis (Bourke, 2020). Di samping itu pula, jika merujuk secara sekilas dari laporan data IPlytics Platform yang tertera pada Tabel 1 dalam menghitung jumlah paten 5G pada bulan Februari 2021, maka tampak Huawei menempati posisi pertama dengan angka 15,39% dalam memegang jumlah terbanyak saham portofolio dan paten 5G baik yang sudah maupun belum diterima di seluruh dunia. Jika hanya menghitung keluarga paten yang sudah diterima maka angkanya pun tidak berbeda jauh dari sebelumnya, yakni 15,38%. Jumlah paten yang dipegangnya tersebut menggambarkan posisi terdepan Huawei dalam inovasi teknologi 5G.

Perusahaan	Keluarga paten 5G	Keluarga paten 5G yang diterima dan aktif
Huawei (CN)	15.39%	15.38%
Qualcomm (US)	11.24%	12.91%
ZTE (CN)	9.81%	5.64%

Tabel 1. Perusahaan pemegang paten 5G teratas (Sumber: IPlytics Platform, 2021)

Walaupun benar Huawei bukan satu-satunya pilihan penyedia teknologi 5G di dunia dan perusahaan lain yang benar-benar bisa menyaingi Huawei dengan penyediaan jaringan nirkabel 5G penuh seperti Ericsson dari Swedia dan Nokia dari Finlandia tentu bisa dipertimbangkan (Mukherjee, 2020), namun sesuai dengan data yang telah dipaparkan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa Huawei masih menjadi pilihan yang menarik dan tidak bisa diabaikan. Karena demikian, salah satu perusahaan telekomunikasi Korea Selatan, yaitu LG Uplus pun memutuskan untuk mengambil penawaran dari Huawei. Bahkan jika menelisik dari sejarahnya, Huawei dan LG Uplus telah lama menjalin kerjasama dalam serangkaian tes bersama dalam operasionalisasi jaringan 5G sejak tahun 2016 (Huawei, 2016) dan selanjutnya keduanya mengumumkan secara resmi pendirian jaringan komersial 5G pada pergelaran *Mobile World Congress* tahun 2019 (Huawei, 2019b).

Namun peluncuran jaringan 5G oleh LG Uplus bersama Huawei di Korea Selatan tersebut kemudian menghadapi kendala sepanjang tahun 2019 hingga seterusnya, situasi menjadi tidak pasti karena Huawei mendapat banyak tuduhan atas isu seputar keamanan pada tahun yang sama. Perlu diketahui sebelumnya bahwa isu keamanan sudah melekat erat pada serangkaian teknologi Tiongkok sejak lama, bahkan setidaknya sejak kebangkitannya dalam pasar global (Kaska, et.al., 2019), terlebih lagi dalam satu dekade terakhir, pemerintah AS dan tidak terkecuali negara-negara sekutunya terus mengawasi perusahaan Huawei dengan hati-hati atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual serta dugaan praktik spionase yang terhubung langsung dengan pemerintah Tiongkok (Fazzini, 2018). Dugaan praktik spionase ini menjadi pembahasan penting karena menurut UU Intelijen Nasional Tiongkok yang berlaku sejak tahun 2017, disebutkan bahwa “semua organisasi dan warga negara harus mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional sesuai dengan hukum” (Bourke, 2020), maka dikhawatirkan Huawei sebagai perusahaan Tiongkok juga turut menyediakan bantuan dalam upaya intelijen Tiongkok. Kekhawatiran ini juga diperparah oleh laporan Komite Intelijen DPR AS pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa Huawei telah menolak untuk menerangkan rincian hubungannya dengan militer maupun dinas intelijen Tiongkok, serta tidak mengungkapkan proses pengambilan keputusan perusahaannya dengan jelas (Fazzini, 2018). Bahkan tidak diketahui dengan pasti siapa sebenarnya yang memegang perusahaan Huawei karena operasinya tidak terdaftar secara publik dan peneliti AS menyatakan bahwa pemiliknya adalah perusahaan induk yang dimiliki 99% oleh suatu entitas yang disebut “komite serikat pekerja” dan 1% sisanya dipegang oleh pendirinya Ren Zhengfei (Bourke, 2020).

Perhatian pada upaya spionase oleh Huawei ini sebenarnya sudah bergulir selama bertahun-tahun sebelumnya bahkan secara kronologis Australia bisa disebut sebagai salah satu yang terdahulu dalam memitigasi risiko spionase tersebut dengan menghalangi akses masuk Huawei, ini tampak dari keputusan pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Julia Gillard untuk melarang National Broadband Network menyuplai peralatan dari Huawei pada tahun 2012 atas pertimbangan keamanan tentang serangan siber dari Tiongkok (Osborne & AAP Senior Political Writer, 2012). Tuduhan spionase pada Huawei pun terus berlanjut seiring berjalannya waktu, sebagai contoh: Pada bulan Januari 2019, seorang pegawai Huawei ditahan di Polandia atas dugaan mata-mata dan kemudian dipecat perusahaan; Pada bulan Maret 2019, badan pengawas Inggris memperingatkan “risiko yang meningkat secara signifikan” dari produk Huawei, dan; Pada bulan April 2019, dilaporkan perusahaan telekomunikasi Vodafone menemukan *backdoor* tersembunyi yang berisiko dalam peralatan Huawei, dan seterusnya (Keane, 2021). Tuduhan spionase itu sendiri telah berulang kali menjadi tema dalam perkara hukum yang dihadapi oleh Huawei, diantaranya seperti kasus Cisco pada tahun 2003 dan gugatan T-Mobile pada tahun 2014 (Kaska, et.al., 2019).

Namun tuduhan seputar spionase tersebut berulang kali dibantah keras oleh Huawei, perusahaan ini menegaskan bahwa dirinya merupakan perusahaan swasta yang tidak terikat dengan pemerintah Tiongkok, serta menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Hingga kini belum ada bukti — setidaknya secara publik — yang membuktikan kebenaran di balik ancaman keamanan yang signifikan dari teknologi Huawei (Kaska, et.al., 2019). Vincent Pang, presiden Huawei divisi Eropa Barat juga mengatakan perusahaan ini “Beroperasi di 170 negara” dan jika tuduhan mata-mata ini benar maka “itu akan menghancurkan pasar kami” (The Economist, 2018). Alhasil, walaupun peralatan jaringan Huawei diduga bisa mendukung spionase, belum ada bukti apapun yang memastikan kebenaran hal tersebut. Namun mengabaikan kurangnya bukti pada perusahaan itu sendiri, banyak pejabat keamanan di Barat masih waspada pada pemerintah Tiongkok, terutama pada kebijakan luar negerinya yang diduga akan menggunakan hubungan bisnis luar negerinya sebagai elemen perang (Martin, 2020). Situasi ini terus bergulir hingga akhirnya isu seputar spionase tersebut juga menyentuh peralatan dan jaringan 5G yang dikembangkan oleh Huawei.

Sebagai catatan, walaupun 5G merupakan teknologi nirkabel yang mumpuni namun bukan berarti tidak membawa implikasi buruk, kehadirannya bisa melahirkan ancaman keamanan baru. Jaringan 5G diyakini bisa membuka ruang yang lebih bebas untuk kegiatan spionase karena menyediakan lebih banyak target dan sarana perantara, serta mengumpulkan dan menguraikan data telemetri dalam jumlah besar karena jangkauan luas dari perangkat yang bisa terhubung (Kaska, et.al., 2019). Presiden AS Donald Trump sendiri menganggap segala bentuk kesepakatan yang mengizinkan Huawei untuk menyediakan peralatan jaringan 5G sebagai “ancaman mematikan untuk keamanan nasional” (Winder, 2020). Sebagai salah satu negara yang keras bersuara untuk mendorong penolakan produk Huawei, AS pun telah menempatkan sejumlah batasan pada Huawei, dibawah perintah keamanan nasional, Trump secara efektif melarang suplai Huawei ke AS pada tahun 2019 (Keane, 2021) dan kemudian juga sebaliknya melarang perusahaan AS untuk menjual produknya pada Huawei.

Pasca AS meluncurkan kebijakan tersebut, semakin banyak negara-negara lain yang mulai ikut menempatkan restriksi pada penggunaan infrastruktur 5G Huawei sejak tahun 2019, diantaranya adalah sekutu AS seperti Selandia Baru, Australia, Taiwan, dan Jepang. Australia dan Taiwan melarang Huawei menjual produknya ke perusahaan lokal, Selandia Baru menolak izin firma lokal Spark untuk memperoleh perlengkapan 5G dari Huawei, dan beberapa hari kemudian Jepang mengumumkan kebijakan baru untuk menghentikan operasi Huawei dan ZTE dalam perbatasannya (The Economist, 2018). Kemudian ada pula Inggris yang mulanya menolak perintah AS untuk menonaktifkan infrastruktur Huawei karena minim bukti nyata atas ancaman keamanan pada tahun 2018, hingga akhirnya memerintahkan penghapusan penuh peralatan Huawei dari seluruh jaringan 5G secara berkala pada bulan Juli 2020 dengan batas akhir tahun 2027 (BBC, 2020). Tiap negara memegang alasan yang berbeda-beda untuk menolak kehadiran Huawei dalam perbatasannya, tapi secara umum tidak jauh berbeda dari alasan yang diutarakan oleh AS, yakni karena kewaspadaannya pada potensi ketergantungan kritis pada peralatan dan teknologi yang berisiko dikendalikan oleh pihak intelijen dan militer Tiongkok mengingat pengaruh legal dan politis negara Tiongkok terhadap industri teknologinya (Kaska, et.al., 2019). Namun bukan berarti semua negara yang menghadapi situasi tersebut akan benar-benar mengambil keputusan yang persis sama. Berbeda dari keputusan yang diambil oleh negara-negara lain, diantaranya seperti yang telah disebutkan diatas, Korea Selatan memilih untuk terus menjalankan operasionalisasi peralatan Huawei.

Hingga terhitung bulan Desember 2021, Huawei masih beroperasi dalam wilayah perbatasan Korea Selatan (Ji-Hyoung, 2021), atau dalam kata lain Korea Selatan masih menolak untuk menghentikan operasi peralatan Huawei termasuk yang sudah terpasang dalam jaringan LG Uplus. Melihat hal tersebut, AS pun telah meminta Korea Selatan untuk tidak menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok — salah satunya seperti Huawei — melalui sarana inisiatif Jaringan Bersih (*Clean Network*). Inisiatif Jaringan Bersih ini sendiri adalah kampanye yang diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada bulan Agustus 2020 untuk melawan Tiongkok, semua negara yang disebut mencintai kebebasan disarankan untuk bergabung dalam inisiatif ini. Melalui inisiatif ini, AS ingin membentuk persatuan garis terdepan dengan negara-negara yang memegang kekhawatiran yang sama — terutama negara-negara sekutu AS — untuk menentang penggunaan peralatan teknologi Tiongkok dalam jaringan digital dan nirkabel global atas alasan risiko keamanan nasional, peralatan yang mendapat perhatian ini diantaranya yang utama adalah jaringan 5G dari Huawei (Seung-Yeon, 2020). Undangan untuk masuk ke dalam kepesertaan inisiatif Jaringan Bersih di atas kemudian diungkit kembali oleh AS selama berlangsungnya *Senior Economic Dialogue* (SED) kelima pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri kedua Korea Selatan Lee Tae-ho dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Keith Krach. Mengabaikan operator seluler Korea Selatan SK Telecom Co. dan KT Corp. yang sudah dilabeli oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai perusahaan telekomunikasi bersih karena tidak menggunakan peralatan Huawei, AS kemudian menekan Korea Selatan untuk menghentikan penggunaan peralatan Huawei dalam infrastruktur LG Uplus Co., yakni perusahaan telekomunikasi Korea Selatan yang lebih kecil (Seung-Yeon, 2020). Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020, LG Uplus merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang masih menggunakan peralatan Huawei dalam jumlah besar untuk jaringan 5G-nya (Hyun-bin, 2020), yakni sekitar 30% (Kyung-tak, 2020).

Sebenarnya jika melihat kilas balik, Korea Selatan, atau lebih tepatnya Majelis Nasional Korea Selatan sudah membahas kekhawatiran seputar peralatan Huawei dan jaminan keamanan 5G sejak tahun 2018 sebagai persiapan sebelum peluncuran masif jaringan 5G (Park, 2019). Namun demikian, walaupun juga sudah mendapat tekanan dari AS seperti yang disebutkan diatas, sebaliknya Korea Selatan masih bersikukuh dan menyatakan dengan jelas bahwa keputusan untuk memilih peralatan yang akan digunakan adalah kebebasan masing-masing perusahaan teknologi dan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses pengambilan keputusan perusahaan swasta

(Seung-Yeon, 2020). Melalui pernyataan singkat tersebut, bisa diasumsikan secara terbatas bahwa Korea Selatan telah menolak untuk bergabung dalam inisiatif Jaringan Bersih dan menghiraukan peringatan yang diberikan oleh AS serta cenderung menutup mata pada segala bentuk risiko keamanan yang diberikan oleh peralatan Huawei tersebut. Hal tersebut mengundang tanda tanya mengingat negara sekutu AS lainnya yang menghadapi situasi yang sama pun akhirnya mengambil keputusan untuk memutus akses suplai Huawei, baik itu seperti Inggris terkait peralatan 5G yang sudah tertanam lama, maupun negara-negara lainnya dalam kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Taiwan yang juga sudah turut ikut menghalangi akses Huawei.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Meskipun mengetahui resiko keamanan yang dapat ditimbulkan, mengapa Korea Selatan tidak bergabung dalam inisiatif Jaringan Bersih serta menonaktifkan peralatan Huawei dalam jaringan 5G LG Uplus pasca diperingatkan oleh Amerika Serikat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Korea Selatan dibalik perilakunya yang mengabaikan peringatan AS terkait resiko keamanan peralatan Huawei secara umum dengan mengelak dari keanggotaan inisiatif Jaringan Bersih dan alasan implisitnya untuk meneruskan operasi peralatan Huawei dalam jaringan LG Uplus walaupun bertentangan dengan peringatan yang diberikan AS secara khusus. Dalam lingkup yang lebih luas, tulisan ini disusun untuk berkontribusi dalam diskusi risiko keamanan teknologi Tiongkok beserta respon negara-negara yang terlibat dalam menghadapi risiko tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

1.4. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penulis akan mengangkut dua landasan poin kerangka pemikiran yang saling berkaitan. **Pertama**, penulis akan memaparkan pertimbangan risiko koersi ekonomi Tiongkok sebagai alasan mendasar yang menghalangi Korea Selatan untuk menonaktifkan operasi peralatan Huawei secara unilateral. **Kedua**, penulis menghadirkan penilaian bentuk inisiatif Jaringan Bersih untuk mendasari alasan dibalik ketiadaan tindak lanjut AS dari sebatas peringatan risiko yang dilayangkannya.

1.4.1. Pertimbangan Risiko Koersi Ekonomi

1.4.1.1. Definisi Koersi Ekonomi

Secara sekilas, koersi bisa diartikan sebagai tekanan pada suatu pihak untuk melakukan sesuatu, tekanan tersebut bahkan dapat melanggar hak seseorang untuk menentukan jalur keputusannya sendiri (Fowler, 1982: 331). Istilah koersi kemudian dapat diaplikasikan dengan menempatkan aktor negara sebagai pihak yang menjalankan koersi, salah satu bentuk koersi yang menjadi perhatian adalah Koersi Ekonomi. Dalam mengartikan Koersi Ekonomi, karya tulis ini akan menggunakan rangkaian istilah sebagaimana yang juga berlaku pada risalah Murray Scot Tanner (2007:11), diketahui bahwa “koersi ekonomi” juga dapat disebut sebagai “tekanan ekonomi”, atau bahkan dalam literasi ilmu politik umum pada diplomasi ekonomi, istilah “sanksi ekonomi” juga dapat digunakan walaupun istilah ini lebih merujuk pada bentuk tekanan yang lebih formal dan terbuka. Ketiga istilah ini akan dimengerti sebagai gagasan yang sama dalam penelitian ini, namun penulis akan menggunakan istilah “koersi ekonomi” secara khusus. Menurut definisi yang disebutkan oleh Elena V. McLean (2021), Koersi Ekonomi disebut sebagai ancaman atau pengenaan biaya ekonomi pada salah satu negara oleh negara lainnya dengan tujuan untuk memperoleh konsesi kebijakan. Kemudian ada pula Drezner (2003: 643) yang mendefinisikan Koersi Ekonomi sebagai ancaman atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah pemrakarsa untuk mengganggu kegiatan ekonomi dengan negara tujuan, kecuali jika negara target ini menyetujui permintaan yang disampaikan. Singkatnya, Koersi ekonomi atau yang bisa pula disebut sebagai tekanan ekonomi adalah upaya koersif atau ancaman ekonomi yang dilakukan oleh negara pemrakarsa terhadap negara tujuan, upaya ini dilakukan oleh negara besar yang bertindak sendiri atau sebagai kepala dari koalisi negara-negara terhadap negara-negara yang lebih kecil.

Secara umum, sebagian besar teori yang menyentuh konsep koersi ekonomi akan berjalan melalui alur *model of action* (model aksi) yang serupa, yaitu negara pemrakarsa mengancam akan mengganggu *status quo* dan menghalangi arus kegiatan pertukaran ekonominya dengan negara tujuan kecuali jika negara yang disanksi setuju untuk memenuhi permintaan khusus yang dituntut oleh negara pemrakarsa. Jika dalam proses ancaman, negara target memenuhi permintaan tersebut, maka sanksi tidak akan dikenakan. Namun sebaliknya, jika negara target tetap bersikukuh pada keputusannya yang bertolak belakang pada permintaan negara pemrakarsa, maka selanjutnya negara pemrakarsa mempunyai pilihan antara mundur dari ancamannya atau benar-benar

menjalankan ancamannya dan menempatkan sanksi yang dijanjikannya (Drezner, 2003: 645). Koersi Ekonomi pada umumnya dilakukan oleh negara-negara besar yang menargetkan negara-negara yang lebih kecil, negara-negara besar tersebut umumnya memilih untuk menjalankan koersi ekonomi sebagai jalur tengah atau alternatif dari pilihan langkah kebijakan lainnya yang dinilai kurang berpengaruh seperti protes diplomatik, atau tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, atau bahkan terlalu berbahaya seperti serangan militer (Tanner, 2007: 11). Alasan yang terakhir juga sejalan dengan penolakan publik yang meningkat pada intervensi militer, alhasil intervensi ekonomi menjadi pilihan kebijakan alternatif (Drezner, 1998: 710).

Bentuk implementasi riil dari koersi ekonomi bisa mencakup gangguan yang disengaja atau ancaman gangguan dari hubungan perdagangan, keuangan, dan ekonomi lainnya. Gangguan ini juga meliputi upaya pengrusakan atau disrupsi ekonomi yang alhasil akan menyulitkan proses bisnis atau mengganggu para pebisnis dan pejabat ekonomi yang berada di negara tujuan (Tanner, 2007: 12). Tujuan dari pelaksanaan koersi ekonomi bisa melingkupi beberapa hal, diantaranya adalah (1) untuk mencegah pemerintahan negara tujuan dari menjalankan beberapa perilaku yang dinilai tidak tepat oleh negara pemrakarsa, atau bahkan memaksa negara tujuan untuk menjalankan beberapa tindakan yang sebelumnya tidak akan dipertimbangkan atau dilakukan oleh negara tujuan tersebut, (2) untuk menghasilkan tekanan publik yang cukup pada pemerintah negara tujuan untuk menciptakan perubahan kebijakan, (3) untuk memancing pemberontakan atau kudeta pada pemerintah negara tujuan yang bisa berujung pada kelahiran pemerintah baru yang akan bergerak sesuai keinginan negara pemrakarsa, dan (4) untuk mengirimkan pesan pada pihak ketiga — baik domestik maupun internasional — tentang tekad negara pemrakarsa dalam menangani negara target. Namun dalam hal ini, tujuan koersi ekonomi lebih merujuk pada aksi yang mencegah negara tujuan dari mengambil perilaku yang dinilai tidak pantas atau tidak sesuai dengan kepentingan negara pemrakarsa, serta mendorong negara tujuan untuk mengubah kebijakannya agar lebih sesuai dengan tuntutan negara pemrakarsa (Tanner, 2007).

Umumnya identifikasi tujuan pelaksanaan koersi ekonomi ini akan disesuaikan pada masing-masing kasus yang diteliti dan salah satu diantaranya yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian karya tulis ini adalah tujuan yang pertama, atau lebih tepatnya untuk mencegah pengambilan kebijakan yang tidak tepat oleh negara pemrakarsa (Tanner, 2007: 12). Melalui implementasi koersi ekonomi maka negara pemrakarsa berharap kerusakan apapun yang akan

diderita negara tujuan pasca koersi ekonomi akan jauh lebih merugikan ketimbang harus mempertahankan kebijakan yang dinilai tidak tepat oleh negara pemrakarsa, jika perubahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka negara pemrakarsa akan meneruskan koersi ekonomi tersebut hingga bahkan meningkatkan tingkat kerusakan gangguan ekonominya (Tanner, 2007: 13). Singkatnya, penempatan sanksi ekonomi akan berakhir pada dua kemungkinan, negara tujuan dapat tunduk pada keputusan yang diberikan atau bersikeras pada keputusannya sendiri (Allen, 2005: 117)

1.4.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koersi Ekonomi

Jika menelisik dari sebagian besar analisis koersi ekonomi, maka ditemukan konsensus kuat terkait tingkat efektivitas atau keberhasilannya yang rendah, sanksi seringkali gagal atau tidak berhasil menciptakan perubahan kebijakan besar, perubahan rezim, atau tujuan-tujuan penting lainnya pada negara-negara asing. Namun demikian, Tanner (2007) dalam risalahnya menyebutkan sejumlah faktor yang masih bisa mempengaruhi keberhasilan dari sebuah koersi ekonomi, beberapa diantaranya yang dapat ditemukan dalam hubungan antara Tiongkok dan Korea Selatan adalah sebagai berikut: **Pertama, faktor ekonomi**, sebagaimana definisi koersi ekonomi sendiri menggunakan biaya ekonomi sebagai alat, maka kapabilitas ekonomi dari negara target untuk menjawab biaya ekonomi yang dibebankan oleh negara pemrakarsa akan sangat mempengaruhi keberhasilan koersi ekonomi. Lebih rinci, salah satu faktor ekonomi yang berkaitan erat adalah jumlah kegiatan ekonomi eksternal — bisa termasuk angka persentase total perdagangan asing dan FDI (*Foreign Direct Investment*) — negara target yang bisa dikendalikan oleh negara pemrakarsa. Semakin tinggi jumlah dan keutamaan dari kegiatan ekonomi eksternal dari negara target yang dapat dikendalikan oleh negara pemrakarsa maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan ekonomi yang bisa dijatuhkan pasca koersi ekonomi.

Keutamaan dari kegiatan ekonomi eksternal tersebut kemudian juga berkaitan dengan daya substitusi dari produk atau aktivitas ekonomi yang disanksi. Koersi ekonomi tentu saja merupakan dorongan kuat bagi pemerintah negara target untuk mencari substitusi domestik, semakin lama negara target dapat bertahan dari tekanan awal yang dibebankan oleh negara pemrakarsa maka semakin tinggi pula kesempatan negara target untuk menyesuaikan diri, hal ini kemudian seringkali menjadi alasan mengapa upaya koersi ekonomi gagal. Karena itu, beban sanksi ekonomi pada awal pelaksanaan koersi ekonomi harus benar-benar memberatkan negara target hingga

negara target tidak dapat menemukan substitusi secepatnya dan terpaksa harus tunduk untuk bertahan diri. Maka semakin sulit negara target menemukan produk, sumber, atau pasar yang dapat menggantikan barang dan jasa yang disanksi, maka dipercaya semakin besar kemungkinan koersi ekonomi untuk berhasil (Tanner, 2007: 20-1).

Kedua, faktor politik, kemudian ada pula faktor-faktor politik yang mempengaruhi keberhasilan negara pemrakarsa dalam memaksa negara tujuan untuk tunduk pada tuntutan yang diberikan. Bahkan secara historis, faktor politis diyakini membawa pengaruh yang lebih besar ketimbang faktor ekonomi pada efektivitas koersi ekonomi. Salah satu faktor politik yang berpengaruh adalah bentuk tujuan atau tuntutan khusus yang diharapkan oleh negara pemrakarsa serta kapasitas dari negara tujuan untuk memenuhi tujuan dan tuntutan tersebut. Negara tujuan yang mendapat gangguan koersi ekonomi harus menimbang dan mempertimbangkan apakah harus mencari dan menerima kompromi kebijakan yang akan diterima kedua belah pihak atau memilih tetap bersikukuh menolak tuntutan yang disampaikan negara pemrakarsa untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional. Diketahui bahwa negara-negara pemrakarsa cenderung bisa mendapatkan keberhasilan dalam mempengaruhi kebijakan negara tujuan apabila permintaannya sederhana atau tidak terlalu memberatkan, sebaliknya secara historis, koersi ekonomi seringkali gagal jika negara pemrakarsa menuntut perubahan kebijakan besar yang dipandang oleh negara target sebagai tuntutan yang tidak masuk akal (Tanner, 2007: 23-4).

1.4.2. Keamanan Jaringan melalui Inisiatif Jaringan Bersih

Menghadapi kehadiran teknologi nirkabel 5G yang semakin berpengaruh dalam membawa pergerakan di berbagai aspek kehidupan, maka tidak salah untuk mengasumsikannya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan keamanan negara. Namun teknologi 5G ini sendiri menyimpan risiko yang inheren dan perlu ditangani, alhasil keamanan jaringan menjadi perih yang penting. Keamanan jaringan adalah perlindungan infrastruktur jaringan yang mendasarinya dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau bahkan pencurian. Untuk membentuk jaringan yang aman maka diperlukan penyusunan infrastruktur beserta perangkat, aplikasi, pengguna, dan aplikasi yang aman (Cisco, t.t.). Menurut *The Prague Proposals* (2019), keamanan jaringan ini – terutama dalam jaringan 5G – diperlukan karena ancaman jaringannya tidak hanya bersifat teknis, tapi juga politis, ekonomis, dan perilaku negatif lainnya yang dilakukan oleh suatu aktor untuk mengeksploitasi ketergantungan kawasan pada teknologi komunikasi yang tersedia, selain itu pula ancamannya

juga bisa mengganggu kegiatan atau proses sosial di masyarakat mengingat implementasi jaringan 5G yang luas.

AS kemudian memperkenalkan program inisiatif Jaringan Bersih yang bertujuan sebagai alat untuk menjalankan kepentingan nasional AS secara luas, tujuan ini tampak dari serangkaian tujuan yang disebutkan dalam program tersebut. Kepentingan nasional ini bisa mencakup peningkatan daya saing ekonomi AS hingga penghindaran risiko yang melekat pada jaringan 5G, salah satu risikonya ialah eksploitasi teknologi komunikasi untuk tujuan spionase maupun sabotase. Tapi agar AS bisa mencapai kepentingan nasional-nya tersebut dengan sebaik-baiknya maka AS perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk benar-benar menyusun jaringan 5G global yang menguntungkan AS, kerja sama tersebut terkonsolidasi dalam rangkaian inisiatif Jaringan Bersih. AS meluncurkan program Jaringan Bersih ini melalui narasi pendirian jaringan yang bersih untuk menyalurkan data dengan aman dan menghindari spionase yang bisa mengancam keamanan nasional, AS telah meyakinkan berbagai negara beserta operator jaringannya untuk ikut serta melarang kehadiran peralatan Huawei dari infrastruktur telekomunikasi (Adhikari, 2020).

Secara luas dapat dikatakan bahwa inisiatif Jaringan Bersih merupakan kesepakatan yang dianjurkan, hal ini dapat diketahui jika menelisik dari beragam cara AS berupaya menarik keanggotaan negara-negara ke dalam program ini, yakni melalui metode yang persuasif dan tidak melibatkan langkah koersif. Metode persuasif ini bisa terlihat dari bentuk advokasinya — terutama oleh penggagas istilah Jaringan Bersih sendiri, Keith Krach — yang bersifat undangan yang berlandaskan pada kepercayaan, mengajak negara-negara untuk ikut serta demi beragam keuntungan, diantaranya yang utama ialah pendirian aliansi untuk menghindari aktor yang merugikan — dalam hal ini merujuk pada Tiongkok — berlandaskan pada *The Prague Proposals* (2019). Bentuk ajakan dalam Jaringan Bersih juga bisa terlihat dari susunan dokumen *National Strategy to Secure 5G* yang menekankan pada pengajakan. Selanjutnya *Prague Proposals* berfungsi sebagai serangkaian rekomendasi dan prinsip yang patut dipertimbangkan negara-negara, namun dalam proposal itu sendiri disebutkan bahwa tidak ada solusi universal, tiap keputusan dalam meningkatkan keamanan harus disesuaikan dengan landasan sosial dan legal, ekonomi, privasi, swasembada teknologi, dan faktor-faktor lainnya yang penting dan unik bagi masing-masing negara (*The Prague Proposals*, 2019). Maka secara keseluruhan inisiatif ini benar-

benar tidak mengikat negara dalam menjalankan serangkaian aktivitas untuk menjaga keamanan jaringan 5G.

1.5. Argumentasi

Korea Selatan tidak bergabung dalam inisiatif Jaringan Bersih AS untuk meneruskan operasi peralatan Huawei dalam infrastruktur 5G LG Uplus karena Korea Selatan mempertimbangkan risiko koersi ekonomi dari Tiongkok dan meninjau inisiatif Jaringan Bersih sebagai kesepakatan yang dianjurkan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang penelitian ini akan meliputi hubungan antara AS dan Korea Selatan terkait program Jaringan Bersih, serta hubungan antara AS dan Tiongkok terkait risiko koersi ekonomi. Jangkauan penelitian akan mencakup dari pembahasan ancaman keamanan jaringan yang bermula dari masa administrasi Obama di AS hingga respon Korea Selatan pada risiko ancaman keamanan yang disampaikan oleh AS pada tahun 2021.

1.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif untuk menyusun hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel yang saling berkaitan. Penelitian ini tidak menciptakan teori baru atau memperdebatkan teori yang telah ada, melainkan menggunakan teori tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan argumentasi

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer akan meliputi laporan dan artikel resmi, sedangkan sumber sekunder akan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel dan pemberitaan daring dari sumber yang bisa dipercaya.

1.6.4. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunannya, penelitian ini akan dirangkai ke dalam empat bagian. Pada bab pembahasan kedua, penulis akan menjelaskan kehadiran Tiongkok beserta koersi ekonomi-nya

dalam mempengaruhi pengambilan keputusan Korea Selatan secara historis, termasuk pengaruh Tiongkok pada keputusan Korea Selatan untuk mempertahankan peralatan Huawei pada operasi infrastruktur 5G LG Uplus. Pada bab pembahasan ketiga, penulis akan berupaya menerangkan kepentingan AS dalam menyampaikan peringatannya kepada Korea Selatan terkait ancaman keamanan yang melekat pada peralatan 5G Huawei secara khusus. Perhatian pada kepentingan AS ini akan digunakan untuk mendalami alasan AS tidak mengambil tindakan apa-apa ketika Korea Selatan tidak bergabung dalam inisiatif Jaringan Bersih. Pada bagian keempat, penulis akan menarik korelasi dari data-data yang telah disediakan diatas untuk membuktikan argumentasi penulis dalam bentuk kesimpulan.